JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 11874-11883
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA PASCA PANDEMI: FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA

La Tamsir Siompo[1], Syahril[2], Andi Halimah[3], Ermi Sola[4]
[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: latamsirsiompo123@gmail.com

Check for updates OPEN ACCESS CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3686

Sections Info

Article history:
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 31 October 2026

Keywords:
Pasca Pandemi
Learning Loss
Kesenjangan Digital

ABSTRACT

This study analyzes post-pandemic education policies in Indonesia, focusing on policy formulation, implementation, impacts, evaluation, and strengthening strategies. It uses a qualitative approach with a literature review design. Data were collected from academic journals and policy documents published between 2020 and 2026, then analyzed through content analysis to identify policy developments, implementation challenges, and opportunities for improvement. The findings show that post-pandemic education policies increasingly emphasize flexible and adaptive approaches, including the Merdeka Curriculum, to support learning recovery. However, implementation remains constrained by unequal digital infrastructure, differences in teacher readiness, and disparities in educational resources, particularly in rural areas and Islamic educational institutions. The literature also indicates that digitalization has a dual impact: it expands learning opportunities but may reinforce inequalities affecting disadvantaged students. Therefore, policy evaluation should consider effectiveness, equity, and responsiveness to local educational needs. Strengthening post-pandemic education requires continuous teacher professional development, equitable infrastructure provision, evidence-based policymaking, and the integration of local wisdom into digital literacy initiatives. These measures are important for promoting inclusive, context-sensitive, and sustainable learning recovery across Indonesia's diverse educational settings for all learners nationwide.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan pascapandemi di Indonesia dengan berfokus pada formulasi, implementasi, dampak, evaluasi, dan strategi penguatan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka. Data dikumpulkan dari jurnal akademik dan dokumen kebijakan yang diterbitkan pada 2020–2026, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi perkembangan kebijakan, kendala implementasi, dan peluang perbaikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pascapandemi semakin menekankan pendekatan fleksibel dan adaptif, termasuk Kurikulum Merdeka, untuk mendukung pemulihan pembelajaran. Namun, implementasinya masih terkendala ketimpangan infrastruktur digital, perbedaan kesiapan guru, dan kesenjangan sumber daya pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan lembaga pendidikan Islam. Literatur juga menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak ganda: memperluas peluang belajar, tetapi berpotensi memperkuat ketimpangan yang dialami peserta didik kurang beruntung. Karena itu, evaluasi kebijakan perlu memperhatikan efektivitas, pemerataan, dan responsivitas terhadap kebutuhan pendidikan lokal. Penguatan pendidikan pascapandemi memerlukan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang merata, perumusan kebijakan berbasis bukti, serta integrasi kearifan lokal dalam inisiatif literasi digital. Langkah-langkah ini penting untuk mendorong pemulihan pembelajaran yang inklusif, sesuai konteks, dan berkelanjutan di berbagai lingkungan pendidikan Indonesia bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Kata kunci: *Pasca Pandemi, Learning Loss, Kesenjangan Digital*

PENDAHULUAN

Krisis kesehatan global akibat pandemi telah memaksa sistem pendidikan di Indonesia untuk melakukan transformasi radikal dari pembelajaran tatap muka menuju moda daring sebagai langkah mitigasi darurat (Muddin et al., 2025). Perubahan paradigma yang terjadi secara tiba-tiba ini tidak hanya menguji ketahanan infrastruktur teknologi, tetapi juga meninggalkan jejak berupa kesenjangan kompetensi dan penurunan motivasi belajar yang signifikan pada peserta didik (Masitoh & Kurnia, 2022). Oleh karena itu, memasuki era pasca pandemi, pemerintah dan pemangku kepentingan dihadapkan pada tantangan besar untuk merumuskan kebijakan pemulihan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengejaran ketertinggalan materi, melainkan juga pemulihan aspek psikososial siswa (Rahman, 2023). Kebijakan pendidikan di fase ini harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjembatani krisis yang telah terjadi sekaligus membangun fondasi sistem pendidikan yang lebih tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap potensi disrupsi di masa mendatang (Kennedy, 2025). Urgensi pemulihan tersebut juga terlihat dari temuan empiris mengenai kehilangan hasil belajar selama pandemi (Hata et al., 2024). melaporkan adanya kehilangan capaian pembelajaran matematika dan bahasa pada siswa sekolah dasar di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pascapandemi perlu dikaji tidak hanya dari segi perubahan kurikulum, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan pemulihan pembelajaran dan mengurangi kesenjangan capaian antarpeserta didik.

Fenomena kehilangan hasil pembelajaran atau learning loss menjadi isu paling kritis yang menuntut respons kebijakan segera dari pemerintah pusat maupun daerah. Data empiris menunjukkan penurunan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara drastis selama masa penutupan sekolah, yang kemudian memicu lahirnya penyederhanaan kurikulum dan fleksibilitas pembelajaran (Jojor & Sihotang, 2022). Transisi kebijakan ini menuntut satuan pendidikan untuk tidak sekadar mengganti dokumen administrasi, tetapi benar-benar mengadaptasi pendekatan pedagogis yang berpusat pada peserta didik dan relevan dengan kebutuhan perkembangan abad kedua puluh satu (Kurniawan & Maimunah, 2025). Dengan demikian, analisis mendalam terhadap siklus kebijakan pendidikan pasca pandemi menjadi sangat esensial untuk mengevaluasi efektivitas intervensi pemerintah dalam mengembalikan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik (Linh & Doan, 2025). Meskipun pemulihan pembelajaran telah menjadi agenda kebijakan, keberhasilannya perlu dilihat dari perubahan nyata dalam proses dan hasil belajar peserta didik(Rejeki, 2022). mengidentifikasi sejumlah persoalan learning loss, antara lain menurunnya semangat belajar, kemampuan literasi, kedisiplinan, dan kesantunan, serta menguraikan strategi pemulihan melalui pendampingan literasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. Temuan tersebut memperkuat pentingnya menelaah hubungan antara arah kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.

Meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan, implementasi di tingkat akar rumput masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural yang memerlukan evaluasi kritis. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperburuk ketimpangan akses, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan (Salsabila et al., 2022). Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru, dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam praktik pedagogis masih menjadi tantangan utama yang belum sepenuhnya terselesaikan ((Rifa', 2023). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah literatur dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan pendidikan diformulasikan dan diadaptasi oleh berbagai institusi dalam

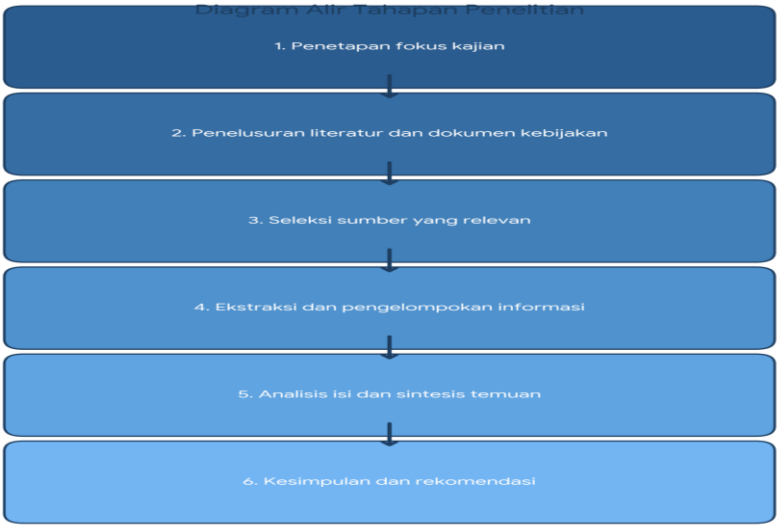
merespons dinamika pasca pandemi, memberikan landasan bagi rekomendasi perbaikan sistem (Pratama et al., 2025). Kajian mengenai kebijakan pendidikan pascapandemi telah membahas pemulihan pembelajaran dan berbagai respons pemerintah. Rahman (2023), misalnya, mengkaji respons kebijakan Indonesia melalui asesmen nasional, pengembangan teknologi digital, dan transformasi pendidikan. Sementara itu, (Rifa', 2023) menelaah persoalan implementasi kebijakan pembelajaran dari aspek kompetensi pendidik, kesiapan peserta didik, dukungan pemangku kepentingan, serta fasilitas dan infrastruktur. Berdasarkan kedua kajian tersebut, artikel ini memusatkan perhatian pada sintesis yang menghubungkan formulasi kebijakan, pelaksanaan, dampak, evaluasi, dan strategi penguatan dalam satu pembahasan terpadu.

METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka untuk menganalisis secara komprehensif dinamika kebijakan pendidikan pada masa transisi pasca pandemi. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai literatur akademik, laporan kebijakan resmi, dan jurnal terindeks yang membahas respons sistem pendidikan terhadap krisis serta strategi pemulihan pembelajaran (Ndari et al., 2026). Teknik analisis isi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi hambatan struktural, serta memetakan inovasi yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan (Tobondo, 2022). Untuk memperjelas proses penelitian, kajian pustaka disusun melalui beberapa tahapan, yaitu (1) menetapkan fokus dan pertanyaan kajian; (2) menelusuri literatur akademik dan dokumen kebijakan yang relevan; (3) menyeleksi sumber berdasarkan kesesuaian topik, rentang tahun, dan ketersediaan informasi; (4) mengekstraksi informasi mengenai formulasi, implementasi, dampak, evaluasi, dan strategi penguatan kebijakan; serta (5) mengelompokkan dan menyintesis temuan untuk menyusun kesimpulan. Tahapan ini perlu dilaporkan sesuai dengan proses yang benar-benar dilakukan dalam penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana formulasi kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik pedagogis nyata, sekaligus memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi rekomendasi perbaikan sistem pendidikan di masa depan (Widyasari, 2022).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Formulasi Kebijakan Pendidikan Pascapandemi

a. Perubahan Kondisi Pendidikan Setelah Pandemi

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan proses pendidikan secara drastis, di mana sistem yang semula bertumpu pada pembelajaran tatap muka di ruang kelas fisik terpaksa beralih ke moda tatap maya dalam waktu yang sangat singkat (Masitoh & Kurnia, 2022). Perubahan mendasar ini tidak hanya mempengaruhi dimensi teknis penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merestrukturisasi hubungan antara guru, siswa, dan orang tua dalam ekosistem pembelajaran yang sepenuhnya baru. Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ditutup, kegiatan belajar-mengajar konvensional dihentikan, dan jutaan peserta didik terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan tingkat kesiapan yang sangat bervariasi (Muddin et al., 2025). Situasi krisis ini menyebabkan perubahan yang sangat mendasar dalam proses pendidikan, sehingga diperlukan adaptasi kebijakan pembelajaran yang sesuai dengan konteks masing-masing lembaga pendidikan agar keberlangsungan layanan pendidikan tetap terjaga (Ndari et al., 2026).

b. Fenomena *Learning Loss*

Fenomena kehilangan hasil pembelajaran atau *learning loss* menjadi dampak paling kritis yang memerlukan respons kebijakan segera dan terukur dari pemerintah. Data empiris menunjukkan penurunan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara signifikan selama masa penutupan sekolah yang berkepanjangan, terutama pada kelompok siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki akses memadai terhadap perangkat teknologi (Muddin et al., 2025). Kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan dalam durasi panjang disinyalir secara langsung menghambat interaksi pedagogis antara guru dan murid, sehingga proses transfer pengetahuan dan pembentukan kompetensi menjadi tidak optimal (Hakim, 2023). Kondisi ini menuntut pemerintah untuk merancang intervensi pemulihan yang terstruktur dan berbasis data, karena dampak *learning loss* yang tidak ditangani dengan serius berpotensi menghasilkan generasi dengan defisit kompetensi jangka panjang yang sulit diperbaiki (Lubis et al., 2022).

c. Tujuan dan Arah Kebijakan

Tujuan utama kebijakan pendidikan pascapandemi diarahkan pada pemulihan kompetensi literasi dan numerasi yang mengalami degradasi signifikan selama masa penutupan sekolah secara massal (Jojor & Sihotang, 2022). Pemerintah merancang kerangka kerja yang lebih fleksibel, salah satunya melalui penyederhanaan kurikulum dan pemberian otonomi luas kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan kecepatan ajar dengan capaian riil siswa (Amalina, 2024). Arah kebijakan ini juga secara eksplisit mengintegrasikan pengembangan teknologi digital dan penguatan karakter, memastikan bahwa pemulihan akademik berjalan beriringan dengan pembangunan kesejahteraan psikososial peserta didik (Rahman, 2023). Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfokus pada pengejaran ketertinggalan materi semata, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan hak belajar yang setara (Asy'arie et al., 2024).

d. Landasan Regulasi

Kebijakan pendidikan pasca pandemi di Indonesia dilandasi oleh kerangka regulasi yang kuat dan berlapis, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis kementerian. Landasan konstitusional terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan hak setiap warga negara atas pendidikan, yang menjadi dasar legitimasi bagi seluruh intervensi kebijakan pemerintah di sektor pendidikan (Lubis et al.,

2022). Pada tingkat operasional, berbagai peraturan menteri dan surat edaran diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan pembelajaran selama dan pasca pandemi, termasuk pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, kurikulum darurat, dan kemudian Kurikulum Merdeka (Amalina, 2024). Kerangka regulasi ini juga diperkuat oleh komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas, yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pemulihan yang inklusif dan berkeadilan (Rahman, 2023).

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pascapandemi

a. Pelaksanaan Kebijakan dalam Pembelajaran

Pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan menunjukkan dinamika yang beragam, di mana model pembelajaran hibrida mulai diadopsi sebagai standar baru untuk menyeimbangkan fleksibilitas teknologi dengan interaksi sosial ((Tobondo, 2022). Satuan pendidikan didorong untuk mengimplementasikan asesmen diagnostik sebagai langkah awal memetakan kebutuhan belajar siswa, sehingga intervensi pedagogis dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan personal (Lubis et al., 2022). Namun, transisi dari pembelajaran daring penuh menuju tatap muka terbatas maupun hibrida ternyata menimbulkan guncangan adaptasi yang cukup serius bagi ekosistem sekolah (Pratama et al., 2025). Guru dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan platform digital dan media interaktif, bahkan saat pembelajaran tatap muka telah berlangsung sepenuhnya, guna mempertahankan motivasi serta keterlibatan kognitif siswa (Widyasari, 2022).

b. Kesiapan Pendidik, Peserta Didik, dan Satuan Pendidikan

Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor determinan dalam keberhasilan implementasi, di mana banyak pendidik mengalami tekanan tinggi akibat tuntutan adaptasi teknologi yang terjadi secara tiba-tiba dan masif (Yanti et al., 2024). Di lingkungan pendidikan Islam, kesiapan madrasah dan pesantren di wilayah pedesaan sering kali menghadapi keterbatasan ganda, baik dalam hal infrastruktur fisik maupun kapasitas manajerial kepala sekolah dalam mengintegrasikan kurikulum digital dengan nilai-nilai keislaman (Abdullah et al., 2024). Meskipun demikian, berbagai program pelatihan dan komunitas belajar mulai menunjukkan perannya dalam menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut melalui kolaborasi antar-peer dan pendampingan profesional yang berkelanjutan, sehingga guru mampu merancang pembelajaran yang kontekstual (Asy'arie et al., 2024).

c. Kesiapan Teknologi dan Sarana-Prasarana

Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur teknologi menjadi prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan pasca pandemi yang mengintegrasikan model pembelajaran hibrida. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus menjadi salah satu aspek prioritas dalam perencanaan pembangunan pendidikan pasca pandemi, karena infrastruktur digital yang memadai merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan (Sari et al., 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa distribusi infrastruktur teknologi masih sangat timpang, dengan sekolah-sekolah di wilayah timur Indonesia dan daerah tertinggal memiliki akses yang jauh lebih terbatas dibandingkan sekolah di Jawa dan kota-kota besar (Rifa', 2023). Kesenjangan infrastruktur ini tidak hanya menghambat implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan, tetapi juga berpotensi memperparah ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah jika tidak segera diatasi melalui intervensi kebijakan yang tegas dan terarah (Abdullah et al., 2024).

d. Kendala dan Kesenjangan Implementasi

Kendala utama dalam implementasi kebijakan bersumber dari infrastruktur digital yang belum merata, menyebabkan kesenjangan akses yang tajam antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil (Salsabila et al., 2022). Selain itu, resistensi terhadap perubahan paradigma pedagogis masih sering dijumpai, di mana sebagian pendidik cenderung mempertahankan metode konvensional karena keterbatasan pemahaman terhadap integrasi teknologi dalam pembelajaran (Rifa', 2023). Kesenjangan ini juga diperparah oleh beban administratif yang masih tinggi, sehingga menyita waktu dan energi guru untuk fokus pada pemulihan akademik siswa yang tertinggal (Amalina, 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan makro yang dirancang di tingkat pusat sering kali mengalami distorsi saat diterjemahkan ke dalam praktik mikro di tingkat satuan pendidikan (Ndari et al., 2026).

3. Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pascapandemi

a. Dampak terhadap Kualitas dan Pemulihan Pembelajaran

Dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran menunjukkan gambaran yang kompleks, di mana penerapan kurikulum baru terbukti mampu memberikan ruang pemulihan bagi siswa yang mengalami kehilangan kompetensi dasar (Amalina, 2024). Pada lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Tsanawiyah, integrasi literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS terbukti efektif meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap nilai-nilai budaya sekaligus mempercepat pemahaman materi yang tertinggal (Puspitasari & Resmalasari, 2023). Asesmen nasional yang menggantikan ujian tradisional berhasil memetakan capaian literasi dan numerasi secara lebih komprehensif, memberikan data awal yang krusial bagi intervensi lanjutan di berbagai satuan pendidikan (Lubis et al., 2022).

b. Dampak terhadap Pemerataan Akses Pendidikan

Dari perspektif pemerataan, kebijakan pascapandemi belum sepenuhnya mampu menutup jurang ketimpangan yang semakin melebar selama masa krisis kesehatan global (Linh & Doan, 2025). Siswa dari kelompok sosio-ekonomi rendah dan wilayah geografis terpencil terus mengalami hambatan struktural dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, meskipun berbagai bantuan perangkat dan kuota telah didistribusikan (Muddin et al., 2025). Beban domestik yang meningkat selama masa transisi juga secara tidak proporsional membatasi partisipasi belajar siswa perempuan, mengindikasikan bahwa dimensi kesetaraan gender belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan pemulihan (Firdaus & Khasanah, 2025). Oleh karena itu, evaluasi pemerataan menuntut adanya pendekatan afirmatif yang secara khusus menargetkan kelompok rentan agar tidak ada satupun peserta didik yang tertinggal (Salsabila et al., 2022).

c. Efektivitas dan Kecukupan Kebijakan

Evaluasi efektivitas kebijakan menunjukkan bahwa intervensi yang bersifat fleksibel dan kontekstual cenderung lebih berhasil dalam memitigasi dampak kehilangan pembelajaran dibandingkan pendekatan yang seragam (Jojor & Sihotang, 2022). Namun, indikator kecukupan kebijakan masih menjadi sorotan kritis, mengingat alokasi sumber daya dan dukungan teknis yang disediakan seringkali belum memadai untuk menjawab kompleksitas masalah di tingkat akar rumput (Kennedy, 2025). Program-program pemulihan yang diluncurkan pemerintah pusat terkadang tumpang tindih dan kurang terkoordinasi dengan baik dengan inisiatif lokal, menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatan anggaran pendidikan (Rahman, 2023). Hal ini menggarisbawahi perlunya pergeseran dari pendekatan kuantitatif dalam alokasi sumber daya menuju pendekatan kualitatif yang lebih terfokus pada dampak nyata dan keberlanjutan program (Asy'arie et al., 2024).

d. Responsivitas Kebijakan terhadap Kebutuhan Pendidikan

Responsivitas kebijakan diukur dari sejauh mana pemerintah mampu mendengarkan dan merespons aspirasi serta kebutuhan riil pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan (Ndari et al., 2026). Meskipun koordinasi antarlembaga mengalami peningkatan selama krisis, mekanisme umpan balik dari guru dan orang tua masih sering terhambat oleh birokrasi yang kaku dan sentralistik (Kennedy, 2025). Kebijakan yang terbukti paling responsif adalah yang memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengadaptasi intervensi sesuai dengan konteks lokal dan karakteristik unik peserta didiknya (Lubis et al., 2022). Ke depan, sistem pendidikan harus membangun saluran komunikasi yang lebih partisipatif, memastikan bahwa formulasi kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi kearifan dan kebutuhan dasar dari komunitas pendidikan (Puspita & Sujarwo, 2025).

4. Strategi Penguatan Kebijakan Pendidikan Pascapandemi

a. Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Pendidikan

Strategi penguatan kapasitas harus berfokus pada transformasi kompetensi pedagogis guru, khususnya dalam merancang pembelajaran hibrida dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk personalisasi belajar (Yanti et al., 2024). Di sisi lain, pemerataan infrastruktur digital tidak boleh lagi sekadar berfokus pada penyediaan perangkat keras, melainkan harus mencakup pembangunan ekosistem teknologi yang inklusif dan terjangkau hingga ke daerah terpencil (Tobondo, 2022). Penguatan literasi digital berbasis kearifan lokal juga menjadi agenda krusial agar integrasi teknologi tidak mencabut peserta didik dari identitas budaya dan konteks sosial mereka (Puspitasari & Resmalasari, 2023). Sinergi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur yang memadai akan menciptakan fondasi yang kokoh bagi ketahanan sistem pendidikan nasional (Kurniawan & Maimunah, 2025).

b. Penguatan Kebijakan Berbasis Data dan Kebutuhan

Perumusan kebijakan di masa depan harus secara mutlak meninggalkan asumsi subjektif dan beralih pada pendekatan berbasis data empiris yang terukur dan akurat (Rahman, 2023). Pemanfaatan rapor pendidikan dan hasil asesmen diagnostik harus dioptimalkan sebagai landasan utama dalam merancang intervensi pemulihan pembelajaran yang tepat sasaran di tingkat satuan pendidikan (Jojor & Sihotang, 2022). Selain itu, kebijakan harus dirancang dengan prinsip responsivitas tinggi, secara rutin mengevaluasi dampak sosial-emosional dan kesenjangan gender untuk memastikan tidak ada kelompok marginal yang terabaikan (Firdaus & Khasanah, 2025). Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan lembaga penelitian akan memperkuat validitas data, memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil benar-benar menjawab akar permasalahan pendidikan pasca pandemi (Linh & Doan, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, formulasi, implementasi, dampak, evaluasi, dan strategi penguatan merupakan aspek yang saling berkaitan dalam analisis kebijakan pendidikan pascapandemi. Untuk memperjelas hubungan antaraspek tersebut, temuan kajian dirangkum dalam tabel sintesis berikut. Tabel ini menunjukkan masalah utama yang dihadapi, implikasinya terhadap kebijakan, serta arah penguatan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan literatur yang dikaji.

Aspek kajian	Permasalahan utama	Arah penguatan
Formulasi	Kebijakan perlu merespons kehilangan hasil belajar	Perumusan kebijakan berdasarkan kebutuhan belajar
Implementasi	Kesiapan pendidik dan infrastruktur belum merata	Pengembangan kompetensi dan dukungan sarana
Dampak	Ketimpangan capaian dan akses belajar	Pemulihan pembelajaran yang inklusif
Evaluasi	Hasil kebijakan perlu dinilai berdasarkan bukti	Pemanfaatan data asesmen dan evaluasi berkala
Strategi penguatan	Kebutuhan antardaerah berbeda	Kolaborasi dan penyesuaian program dengan konteks lokal

Sumber: sintesis penulis berdasarkan Rejeki (2022), Rahman (2023), Rifa'i (2023), dan Hata et al. (2024).

KESIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap kebijakan pendidikan pascapandemi menegaskan bahwa transformasi sistem pendidikan tidak dapat lagi kembali ke paradigma konvensional yang kaku dan seragam. Formulasi kebijakan yang mengedepankan fleksibilitas kurikulum dan model pembelajaran hibrida telah memberikan kerangka kerja adaptif untuk mengatasi kehilangan pembelajaran, meskipun implementasinya masih terhambat oleh kesenjangan infrastruktur dan kompetensi pendidik. Evaluasi menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal harus menjadi inti dari setiap intervensi kebijakan agar pemulihan pendidikan dapat berjalan secara inklusif, termasuk di lingkungan madrasah dan lembaga pendidikan Islam di daerah pedesaan. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan pascapandemi tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang adaptif, tetapi juga oleh kesiapan pelaksana, ketersediaan sumber daya, pemerataan akses, serta evaluasi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perlu diperkuat agar kebijakan pemulihan pembelajaran dapat menjawab kebutuhan peserta didik secara lebih tepat. Ke depan, penguatan kapasitas guru, pemerataan infrastruktur digital, serta perumusan kebijakan berbasis data empiris menjadi syarat mutlak untuk membangun ekosistem pendidikan nasional yang tangguh. Rekomendasi strategis ini menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan integrasi kearifan lokal dalam digitalisasi, memastikan bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak hanya pulih, tetapi juga berevolusi menjadi lebih adil dan berorientasi pada masa depan.

REFERENSI

Abdullah, W., Syafuri, B., & Fauzi, A. (2024). Kebijakan pendidikan pasca pandemi covid-19 di madrasah berbasis pedesaan. *Jurnal Al-Murabbi*, *9*(2), 196–204.

Amalina, A. (2024). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, *7*(1), 127–135.

Asy'arie, B. F., Sari, P. P., Mariyana, W., & Mustofa, M. A. (2024). EXAMINING SCHOOL

AND MADRASAH EDUCATION POLICIES IN POST-PANDEMIC LEARNING RECOVERY IN INDONESIA. *ARROSIKHUN: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*, *04*(01), 1–15.

Firdaus, M. J., & Khasanah, N. (2025). Peran pendidikan dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia pasca pandemi COVID 19. *Al Ikhlas Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(2). https://doi.org/10.64677/ppai.v2i2.191

Hakim, M. L. (2023). Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Berakibat Learning Loss dan Penurunan Kualitas Pendidikan. *Jurnal JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, *4*(2), 117–126.

Hata, A., Kim, S., & Nomura, S. (2024). *Learning in the Shadow of the Pandemic : COVID-19 Learning Loss and Widening Learning Disparities in Indonesia*. *June*, 1–69.

Jojor, A., & Sihotang, H. (2022). EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, *4*(4), 5150–5161.

Kennedy, A. (2025). Membangun Kebijakan Publik yang Tangguh : Pembelajaran dari Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Socio-Political Communication and Policy Review*, *2*(5), 1–9.

Kurniawan, S., & Maimunah. (2025). Pre- and Post-Pandemic Curriculum Needs : A Constructivist Perspective. *Jurnal Ilmiah WUNY*, *7*(2), 1–17.

Linh, T. T. M., & Doan, H. H. (2025). Research Article A Comparative Study of Education Recovery Policies in Indonesia and Nigeria. *EDUTREND Journal of Emerging Issues and Trends in Education*, *2*(2), 59–71.

Lubis, N. S., Latifah, A., Safitri, D., & Najwan, S. (2022). Implementasi kebijakan pendidikan dalam mengatasi loss learning pasca pandemi covid-19. *JIEBAR : Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, *03*(02), 142–153. https://doi.org/10.33853/jiebar.v3i2

Masitoh, N. A., & Kurnia, H. (2022). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BESERTA DAMPAKNYA. *AoEJ: Academy of Education Journal*, *13*(1), 74–83.

Muddin, S., Mardiana, Yuspiani, & Musdalifah. (2025). Analisis kebijakan pendidikan di era pandemi. *AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*, 104–115.

Ndari, W., Suyatno, S., & Sukirman, S. (2026). POST-PANDEMIC LEARNING POLICY ADAPTATION IN ELEMENTARY SCHOOLS IN YOGYAKARTA. *JURNAL KEPEMIMPINAN & PENGURUSAN SEKOLAH*, *11*(1), 426–439.

Pratama, P. Y. S., Suwastini, N. K. A., Nitiasih, P. K., Dantes, G. R., Mahayanti, N. W. S., Jayantini, I. G. A. R., & Minxia, Z. (2025). Mitigating Learning Losses: Causes, Manifestations, and Strategies for Post-Pandemic Educational Recovery. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, *28*(1), 120–144.

Puspita, M., & Sujarwo. (2025). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Penelitian Akademik: Pemetaan Tren dan Analisis Bibliometrik Lima Dekade Terakhir. *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *1*(1), 25–40.

Puspitasari, R., & Resmalasari, S. (2023). Penguatan literasi digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS di MTs Kota Cirebon pasca pandemi. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, *10*(02), 129–143.

Rahman, A. (2023). Education Policy in a Post-Pandemic: Recovery and Strengthening of Learning in Indonesia. *JPALG Journal of Public Administration and Local Governance*, *7*(1),

43–49. https://doi.org/10.31002/jpalg.v7i1.7436

Rejeki, N. (2022). *Analisis Learning Loss dan Strategi Recovery Pasca Pembelajaran Jarak Jauh*. *2*(3), 407–422.

Rifa', A. A. (2023). Problems with the Policy Implementation of Learning Management During the COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Retrospective Analysis for Post-Pandemic Policy. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *10*(1), 84–97.

Salsabila, H., Dewi, M. S., Galand, P. B. J., & Haliza4, V. N. (2022). Konsep Kebijakan dan Inovasi dalam Pendidikan di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(7), 397–403. https://doi.org/10.5281/zenodo.6596498

Sari, N. D., Megawanti, P., & Setiawan, J. (2024). Tantangan dan Model Pembelajaran Pasca Pandemi COVID-19 di Perguruan Tinggi. *Journal of Education Research*, *5*(3), 2671–2677.

Tobondo, Y. A. (2022). Pandemi COVID-19 dan Perubahan Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan: Apakah Ruang Kelas Tetap Memiliki Peran dalam Pembelajaran Pasca Pandemi? *Jurnal Pandelo'e Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Tentena*, *2*(2), 1–11.

Widyasari, N. F. (2022). Strategi Pelaksanaan Tatap Muka (Pembelajaran Luring) Pasca Pandemi Covid-19. *Journal of Instructional and Development Researches*, *2*(4), 153–161.

Yanti, S., Julaeha, S., & Nurdeni. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*, 101–106.

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA